RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN NGANJUK

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan program dan kegiatan;

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;

Dipindai dengan CamScanner

oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Dipindai dengan CamScanner

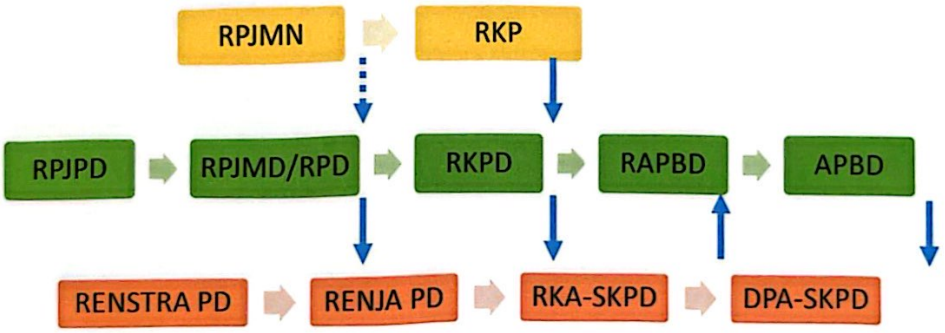
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan Rancangan Akhir;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

diperhatikan

dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Dipindai dengan CamScanner

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
36. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2025;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dipindai dengan CamScanner

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran. serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rankhir Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*// kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaisan Realisasi Target Restra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5 + 7+9)*	*11 = (10/4)*
5	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**62 Nilai**	**62 Nilai**	**62 Nilai**	**62 Nilai**	**100%**	**62 Nilai**	**100%**	**100%**
5	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggara, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dukumen capain kinerja yang disusun Tepat waktu**	**16 Dokumen**	**16 Dokumen**	**16 Dokumen**	**16 Dokumen**	**100%**	**16 Dokumen**	**100%**	**100%**
5	1	2,01	1	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	100%	100%
5	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
5	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
5	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
5	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

5	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
5	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
5	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji PNS dan Laporan semester dan Achir Tahun yang diselesaikan**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100%**	**7 Dokumen**	**100%**	**100%**
5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	13 Orang	13 Orang	13 Orang	100%	13 Orang	100%	100%
5	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
5	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	100%	100%
5	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2 Dokumen**	**100%**	**100%**
5	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57 Paket	57 Paket	57 Paket	57 Paket	100%	57 Paket	100%	100%
5	1	2,05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Beradasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	100%	57 Orang	100%	100%
5	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat Daerah**	**17 Dokumen**	**17 Dokumen**	**17 Dokumen**	**17 Dokumen**	**100%**	**17 Dokumen**	**100%**	**100%**
5	1	2,06	1	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	100%	100%
5	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	100%	100%
5	1	2,06	5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	100%	100%
5	1	2,06	6	Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%	100%
5	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

5	1	2,06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
5	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	100%	100%
5	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang yang di Inventariskan**	**4 Unit**	**4 Unit**	**4 Unit**	**4 Unit**	**100%**	**4 Unit**	**100%**	**100%**
5	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%
5	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%	100%
5	1	2,07	5	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%
5	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	100%	100%
5	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	100%	100%
5	**1**	**2,08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Keperluan kantor yang terpenuhi**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**100%**	**7 Laporan**	**100%**	**100%**
5	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
5	1	2,08	2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%	100%
5	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
5	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah**	**10 Unit**	**10 Unit**	**10 Unit**	**10 Unit**	**100%**	**10 Unit**	**100%**	**100%**
5	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	32 Unit	100%	100%
5	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	100%	100%
5	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

5	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	100%	100%
5	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rata-Rata Waktu Tanggap Bencana**	**72 Persen**	**72 Persen**	**72 Persen**	**72 Persen**	**100%**	**72 Persen**	**100%**	**100%**
5	**4**	**2,01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**100%**	**13 Dokumen**	**100%**	**100%**
5	4	2,01	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
5	4	2,01	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
5	4	2,01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
5	4	2,01	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	100%	100%
5	4	2,01	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%	100%
5	4	2,01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%
5	4	2,01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam kebakaran peserta Pembinaan	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	100%	57 Orang	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

5	4	2,01	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	20 Desa/kelurahan	20 Desa/kelurahan	20 Desa/kelurahan	20 Desa/kelurahan	100%	20 Desa/kelurahan	100%	100%
5	4	2,01	9	Penyelenggaraan Kerjasama Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencagahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
5	**4**	**2,02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Jumlah dukumen data sarana prasarana dan hasil Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2 Dokumen**	**100%**	**100%**
5	4	2,02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
5	4	2,02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
5	**4**	**2,03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Dukumen hasil investigasi Kejadian Kebakaran**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**100%**	**100%**
5	4	2,03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
5	**4**	**2,04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Sosialisasi edukasi pembinaan relawan, dan sarana prasarana dalam pengegahankebakaran**	**220 Orang**	**220 Orang**	**220 Orang**	**220 Orang**	**100%**	**220 Orang**	**100%**	**100%**
5	4	2,04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2160 Orang	2160 Orang	2160 Orang	2160 Orang	100%	2160 Orang	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

5	4	2,04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/kelurahan	20 Desa/kelurahan	20 Desa/kelurahan	20 Desa/kelurahan	100%	20 Desa/kelurahan	100%	100%
5	4	2,04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
5	**4**	**2,05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Jumlah Operasi Pencarian Pertolongan, standarisasi sarana prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi. Dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahyakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**100%**	**100%**
5	4	2,05	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
5	4	2,05	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
5	4	2,05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahyakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	57 Orang	57 Orang	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	100%	100%
5	4	2.05	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatandan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	12 Unit	12 Unit	57 Orang	57 Orang	100%	57 Orang	100%	100%

Dipindai dengan CamScanner

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.3.

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31%	Sangat Rendah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	42%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Renstra PD**	**Kebijakan yang diambil**
Data Capaian Sasaran Pembangunan Daerah belum dapat Terdefinisi	Kurang Tercapainya Sasaran Pembangunan Daerah	Koordinasi, Singkronasi,monitoring, dan Evaluasi Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra PD			Realisasi			Proyeksi	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2023	
V.c.	Sub Urusan Pemadam Kebakaran										
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dipindai dengan CamScanner

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.5.

Indikator Kinerja Individu

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4			5
	Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran	18 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

Tabel 2.6.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
			2024	2025	2026	
1	2	3	4			5
	Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran	99,98 %	98,95%	99,95 %	100 %	100 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , perlunya menetapkan permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan pendorong terlaksananya program- program kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam penyusunan program belum terintegritasnya perencanaan program secara lintas sektor dan wilayah tidak terpadu, maka diperlukannya pemahaman standar teknis dalam pelaksanaan program tersebut. Kendala lainnya yaitu masih kurangnya atau minimnya peralatan untuk mendukung kegiatan .

2.2.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diketahui bahwa tugas dan fungsi institusi pemadam kebakaran bukan hanya saat terjadi kebakaran/operasi pemadaman kebakaran melainkan saat pra kebakaran dan pasca kebakaran. *Pra kebakaran* dengan lingkup kegiatan dalam situasi melakukan pencegahan seperti melakukan pemetaan, pendeteksian, mitigasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan serta inspeksi dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. *Operasi Pemadamanan Kebakaran* dengan lingkup kegiatan meliputi; komunikasi, tindakan kajian dan analisis pemadamanan secara cepat tepat, melakukan upaya lokalisir/minimalisir kebakaran, evakuasi terhadap korban kebakaran danpenyelamatan jiwa serta harta benda. Pasca kebakaran dengan lingkup kegiatan meliputi; pendataan, analisis kerugian, mobilisasi pertolongan, penyelidikan atau investigasi penyebab kebakaran dan penyampaian laporan ke WEB Pemadam Kebakaran dalam rangka upaya tindakan rehabilitasi dan rekostruksi.

Dalam implementasi situasi prakebakaran, Operasi Kebakaran dan pasca kebakaran ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki keterbatasan

Seperti SDM, sarana dan prasarana namun Dinas Pemadam Kebakaran telah berusaha melaksanakan pelayanan yang optimal kepadamasyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Standar Pelayanan Prosedur (SOP).

Dipindai dengan CamScanner

Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/kegiatan, karena pada dasarnya program/kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kendala dan permasalahan cukup krusial yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih belum memadainya infrastruktur dan prasarana dasar lainnya;
2. Peralatan yang dimiliki masih belum memadai, baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhipelayanan;
3. Kurangnya Personil Lapangan yang sesuai dengan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran DiDaerah.
4. Mayoritas petugas pemadam kebakaran Kabupaten Nganjuk adalah Tenaga Harian Lepas (THL) sehingga masih terbatasnya tenaga Administrasi di bagian perencanaan, keuangan, monitoring, dan evaluasi. Dengan demikian efektivitas dan efisiensi dalam implementasi suatu kegiatan belum begitu optimal.
5. Petugas pemadam kebakaran harus memiliki intergritas dan mentalitas pekerja keras, pekerja cerdas dan pekerja ikhlas supaya setiap langkah dalam melaksanakan tugas lebih fokus dan terarah serta dapat menghasilkan hasil kerja atau output/outcome yang dapat.
6. Sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk untuk melayani masyarakat saat ini sebagian besar telah melewati umur ekonomis sehingga biaya pemeliharaan menjadi tinggi.
7. Persepsi masyarakat tentang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran sebagai mitra bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam prakebakaran, saat kebakaran dan pasca kebakaran masih perlu ditingkatkan.
8. Masih kurangnya tenaga Pemadam Kebakaran dan Pos Pantau yang dimiliki mengingat Kabupaten Nganjuk yang sangat luas yang mempunyai 20 Kecamatan dan saat ini baru mempunyai 4 Pos Pantau

Dipindai dengan CamScanner

Pemadam Kebakaran yang berada di Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Pace.

2.2.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk adalah merupakan salah satu Dinas dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang kondisi obyektif dalam pelayanan yang diberikan belum optimal. Banyak permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya layanan tersebut antara lain, kecakapan SDM masih sangat rendah, kurangnya sarana dan prasarana operasional dan belum menempatkan kepuasan pengguna sebagai suatu keharusan.

Sistem manajemen kepegawaian yang menjadi salah satu kendala tidak tercapainya suatu profesionalisme.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah "Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera", dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.

   Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh.

2.2.4. Penentuan Isu – Isu

Berdasarkan identifikasi permasalahan urusan kebakaran, dengan mensinergiskan visi misi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mencakup keselarasan dengan sasaran yang ada pada dokumen renstra K/L dan renstra provinsi serta dengan memperhatikan isu- isu urusan kebakaran, maka terdapat beberapa isu penting Kabupaten Nganjuk yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebakarandan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis Dinas Kebakaran Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang penanggulangan kebakaran.
3. Agar pemadaman kebakaran dapat menjangkau hingga kampung sehingga perlu adanya pembangunan hidrankampung.
4. Kemampuan masyarakat masih cukup rendah dalam penggunaan APAR sehingga perlu adanya penyuluhan kebakaran sampai pada wilayah kampung.

Dipindai dengan CamScanner

Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran sehingga perlu disosialisasikan pada semua gedung-gedung terutama pada fasilitas umum.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah *"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".*

Proses review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.7.

Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu
								11,778,170,324
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**65 Nilai**	**8,623,054,824**
1	**05**	**1**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggara, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dukumen capain kinerja yang disusun Tepat waktu**	**16 Dokumen**	**95,905,000**
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5,715,000
1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,300,000
1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,650,000
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,650,000
1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,650,000

1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	46,560,000
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	28,380,000
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji PNS dan Laporan semester dan Achir Tahun yang diselesaikan**	**7 Dokumen**	**3,896,049,753**
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	3,888,669,753
1	05	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,952,000
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	6 Laporan	4,428,000
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	**2 Dokumen**	**0**
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57 Paket	0
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Beradasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	0
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat Daerah**	**17 Dokumen**	**586,396,686**

Dipindai dengan CamScanner

1	05	01	1.06	0001	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	10 Paket	17,048,436
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	129,831,350
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	18,542,150
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3,000,000
1	05	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	58,118,750
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	348,186,000
1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	12 Dokumen	11,670,000
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang yang di Inventariskan**	**4 Unit**	**1,927,416,750**
1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaang Disediakan	1 Unit	0
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan *Kendaraan Dinas* Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2 Unit	1,600,000,000
1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	85,091,500
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	242,325,250

Dipindai dengan CamScanner

1	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Keperluan kantor yang terpenuhi**	**7 Laporan**	**680,424,000**
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,600,000
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	90,000,000
1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	586,824,000
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah**	**10 Unit**	**1,436,862,635**
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	224,902,635
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	587,130,000
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	31,000,000
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	593,830,000

Dipindai dengan CamScanner

1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rata-Rata Waktu Tanggap Bencana**	**72 Persen**	**3,155,115,500**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**13 Dokumen**	**2,965,387,500**
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	679,824,000
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	65,250,000
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	51,750,000
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	3,000,000

Dipindai dengan CamScanner

1	05	04	2.01	0005	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Unit	9,600,000
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Unit	2,108,381,000
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam kebakaran peserta Pembinaan	57 Orang	44,582,500
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	20 Desa/kelurahan	1,500,000
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerjasama Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan *Kemitraan dalam Pencagahan* , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1,500,000
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Jumlah dukumen data sarana prasarana dan hasil Penilaian**	**2 Dokumen**	**30,500,000**

Dipindai dengan CamScanner

						Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran		
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	25,500,000
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	5,000,000
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Dukumen hasil investigasi Kejadian Kebakaran**	**1 Dokumen**	**21,300,000**
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	21,300,000
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Sosialisasi edukasi pembinaan relawan, dan sarana prasarana dalam pengegahankebakaran**	**220 Orang**	**135,199,000**
1	5	4	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2160 Orang	89,031,000

Dipindai dengan CamScanner

1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/kelurahan	30,168,000
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	2 Dokumen	16,000,000
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Jumlah Operasi Pencarian Pertolongan, standarisasi sarana prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi. Dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahyakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi**	**4 Laporan**	**2,729,000**
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi *Pencarian dan Pertolongan* pada *Peristiwa yang Menimpa*, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil *Penyelenggaraan* Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	2 Laporan	2,729,000
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	2 Dokumen	0

Dipindai dengan CamScanner

1	05	04	2.05	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahyakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	12 Unit	0
1	05	04	2.05	0005	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatandan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	57 Orang	0

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi HIjau, dan ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pembagunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menngembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Argomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Pemeratan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyuludupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam pencapaian prioritas pembagunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembagunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap

Dipindai dengan CamScanner

tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dari Rencana Kerja di atas diwujudkan dengan terukur dalam sasaran sebagaimana Menciptakan suasana kerja yang kondusif diwujudkan dengan sasaran:

Tersedianya prasarana perkantoran yang memadai.

1. Tersedianya peralatan lapangan yang memadai.
2. Tersedianya Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
3. Tersedianya Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
4. Terwujudnya kelancaran komunikasi melaluitelepon.
5. Terwujudnya tertib administrasikeuangan.
6. Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor.
7. Terwujudnya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluardaerah.
8. Berkurangnya prosentase kerusakan gedung.
9. Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional.
10. Terpenuhinya tenaga sukarela petugas pemadamkebakaran.

Terwujudnya peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran		Cakupan Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang diselamatkan	Persen	98,88	99,95	100
		Meningkatkan Respons Kebakaran dan Penyelamatan	Tingkat Waktu (tanggap respon time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyusunan Dokumen Peracanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
b. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas pok dan funsi

Dipindai dengan CamScanner

1.4 Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan bahan logistik kantor
c. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan
e. Fasilitas Kunjungan tamu
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pengadaan Mebel
d. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya.

1.6 Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Surat menyurat
b. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
d. Pemeliharaan Peralatan mesin lainya

2. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

2.1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

a. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

b. Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

c. Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

d. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

e. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung diri

g. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

h. Pengelolaan system Komunikasi dan Informasi Kebakaran dalam Penyelamatan (SKIK)

i. Penyelenggaraan Kerjasama Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

2.2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan

a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

b. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

2.3 Kegiatan Investigasi Peralatan Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan

a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

b. Penilaian sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

2.4 Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran

Sub Kegiatan

a. Investigasi Kejadian Kebakaran , meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kebakaran

2.5 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

2.6 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan dan Pemberdayaan terhadap kondisi membahayakan manusia

Sub Kegiatan

a Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa,membahayakan dan/atau mengancam Keselamatan manusia

Dipindai dengan CamScanner

b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

d. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Demi terwujudnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran yang maksimal dan dapat dijangkau rasio Pemadam Kebakaran yakni 15 menit dan sesuai dengan SOP maka dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memprogramkan Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun 2025 sbb :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		(Output)	Target	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**65 Nilai**	**8,623,054,824**
A	**Perencanaan, Penganggara, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dukumen capain kinerja yang disusun Tepat waktu**	**16 Dokumen**	**95,905,000**
a	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5,715,000
b	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,300,000
c	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,650,000
d	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,650,000
e	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,650,000
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	46,560,000
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	28,380,000
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji PNS dan Laporan semester dan Achir Tahun yang diselesaikan**	**7 Dokumen**	**3,896,049,753**

Dipindai dengan CamScanner

a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	3,888,669,753
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,952,000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	6 Laporan	4,428,000
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	**2 Dokumen**	**0**
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57 Paket	0
b	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Beradasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	0
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat Daerah**	**17 Dokumen**	**586,396,686**
a	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	10 Paket	17,048,436
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	129,831,350
c	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	18,542,150
d	Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3,000,000
e	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	58,118,750
f	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	348,186,000
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	12 Dokumen	11,670,000
E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang yang di Inventariskan**	**4 Unit**	**1,927,416,750**

Dipindai dengan CamScanner

a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaang Disediakan	1 Unit	0
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2 Unit	1,600,000,000
c	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	85,091,500
d	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	242,325,250
e	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0
F	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Keperluan kantor yang terpenuhi**	**7 Laporan**	**680,424,000**
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,600,000
b	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	90,000,000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	586,824,000
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah**	**10 Unit**	**1,436,862,635**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	224,902,635
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	587,130,000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	31,000,000
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	593,830,000
II	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Rata-Rata Waktu Tanggap Bencana**	**72 Persen**	**3,155,115,500**

Dipindai dengan CamScanner

A	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**13 Dokumen**	**2,965,387,500**
a	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	2 Dokumen	679,824,000
b	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	65,250,000
c	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	51,750,000
d	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	3,000,000
e	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	2 Unit	9,600,000
f	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Unit	2,108,381,000
g	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam kebakaran peserta Pembinaan	57 Orang	44,582,500
h	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan	20 Desa/kelurahan	1,500,000

Dipindai dengan CamScanner

		dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		
i	Penyelenggaraan Kerjasama Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencagahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1,500,000
B	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Jumlah dukumen data sarana prasarana dan hasil Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran**	**2 Dokumen**	**30,500,000**
a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	25,500,000
b	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	5,000,000
C	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Dukumen hasil investigasi Kejadian Kebakaran**	**1 Dokumen**	**21,300,000**
a	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	21,300,000
D	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Sosialisasi edukasi pembinaan relawan, dan sarana prasarana dalam pengegahankebakaran**	**220 Orang**	**135,199,000**
a	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2160 Orang	89,031,000

Dipindai dengan CamScanner

b	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/kelurahan	30,168,000
c	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	2 Dokumen	16,000,000
E	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Jumlah Operasi Pencarian Pertolongan, standarisasi sarana prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi. Dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi**	**4 Laporan**	**2,729,000**
a	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	2 Laporan	2,729,000
b	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	2 Dokumen	0
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahyakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	12 Unit	0
d	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatandan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	57 Orang	0

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 4.2
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Penyelamatan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner